

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kepada Maha Besar Tuhan karena berkat dan kasihnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat di selesaikan. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana kerja instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam Renstra ini disampaikan perihal rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah yang dilandasi oleh VISI dan MISI Bupati Minahasa Tenggara dengan memperhatikan kebijakan umum dan kondisi wilayah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 - 2018.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah otonom perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai, pengelolaan keuangan daerah dan penataan kelembagaan.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, program, kegiatan dan indikator mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2013 – 2018 Kabupaten Minahasa Tenggara.

Demikian Rencana Strategis ini disusun agar diketahui program dan kegiatan demi terarahnya pengelolaan anggaran dan belanja.

Ratahan,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
BARANG MILIK DAERAH

MECKY R. T. TUMIMOMOR, SE. MSi

Pembina Tkt I

NIP. 196603281994031005

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung terwujudnya Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu di selenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, tertib, terbuka dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai instrumen pertanggungjawaban, perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana kerja instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya Kabupaten Minahasa Tenggara maka semua hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" maka penjabaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara kedalam RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016, akan dijadikan

pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara” . Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan disusunnya Renstra ini maka sangat jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang - Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- f. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dan Perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/ Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
- m. Permendagriner Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan kedua nomor 22 Tahun 2011;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan – perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

#### b. Tujuan

Penyusunan rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah tahun 2013-2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan program yang ditetapkan dalam RKPD, RENJA, KUA PPAS/ PPA, Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan potensi yang tersedia.

## 1.4. Sistematika Penulisan

### Bab.I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab.II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

### Bab.III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.
- 3.2 Kondisi Yang Diharapkan

### Bab.IV VISI , MISI , TUJUAN, STRATEGI , DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Stratejik dan Kebijakan

### Bab. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

### Bab. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

### Bab. VII PENUTUP

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah untuk membantu Bupati dalam menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### A. Tugas.

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah, badan pengelola keuangan dan barang milik daerah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

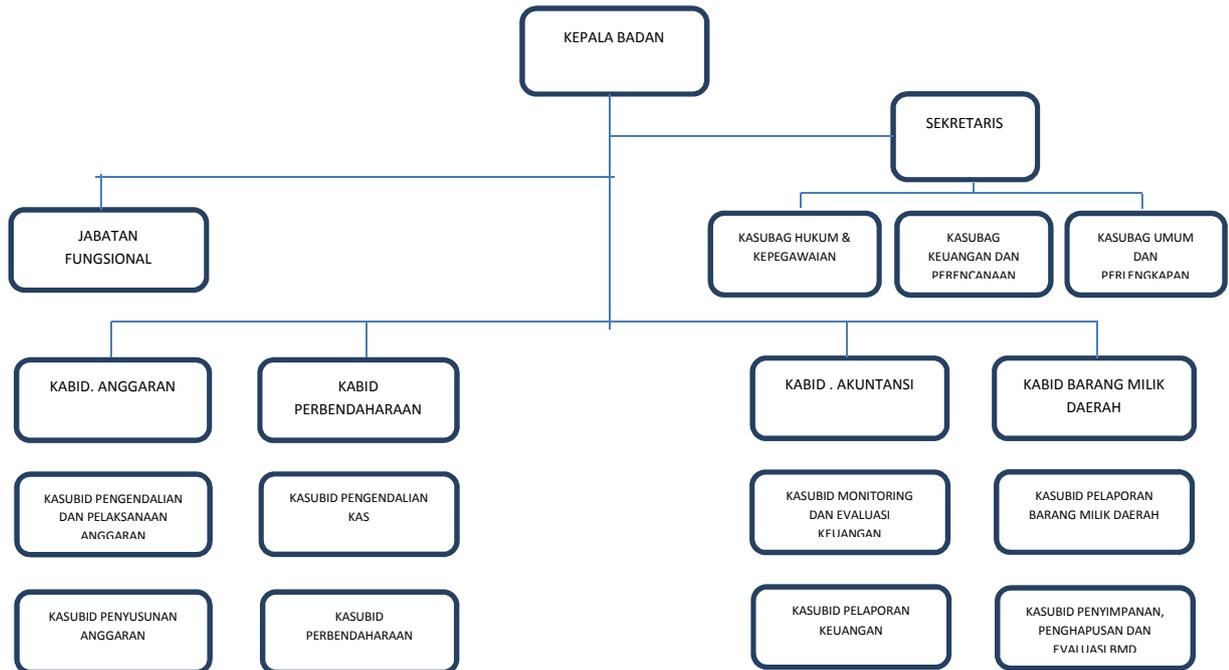
#### B. Fungsi

Adapun Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

C. Struktur Organisasi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD

Peran dan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Barang milik Daerah sebagai fasilitator dalam mendukung proses pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien akan berjalan optimal apabila ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Salah satu sumber daya penentu adalah tersedianya sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai.

Jumlah personil Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 50 (lima puluh ) orang.

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Jabatan	Jumlah						KET
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	KEPALA BADAN		1					
2	SEKRETARIS			1				
3	KEPALA BIDANG		1	3				
4	KEPALA SUB BAG./SUB.BID		1	10				
5	STAF/PELAKSANA			10	1			
Pegawai Tidak Tetap/ Honorer								
6	Staf Pelaksana			16	1	4	1	

TABEL 2

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian/Bidang	11
5.	Kepala UPT Dinas	0
6.	Fungsional	0



BAB III  
ISU – ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan uraian pada Bab II dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut :

Tabel

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKBMD  
Kabupaten Minahasa Tenggara

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.Peraturan tentang pengelolaan keuangan yang berbasis akrual 2.Adanya berbagai aplikasi pelaporan keuangan, misalnya SIKD, SINERGI dan SIMPATI 3.Pengelolaan gaji pegawai yang belum optimal	Peraturan tentang pengelolaan keuangan  Aplikasi SIKD  SIMDA Gaji	Ketersediaan peraturan tentang pengelolaan keuangan  Terbatasnya PNS yang memahami aplikasi pelaporan keuangan  Aplikasi untuk pengelolaan gaji yang belum optimal	Peraturan yang berubah-ubah  Peraturan yang berubah-ubah  Pembuat daftar gaji / Bendahara SKPD terlambat membuat daftar gaji / melakukan pencairan	Terbatasnya PNS yang memahami peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Adanya berbagai aplikasi pelaporan keuangan yang harus disampaikan ke pusat yang memiliki dampak pada penyaluran dana transfer  Aplikasi SIMDA Gaji yang belum optimal
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sterilisasi ruangan yang belum optimal	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kegiatan kantor	Belum adanya ruangan khusus untuk bendahara SKPD dan pihak lain yang berhubungan dengan BPKBMD	Kurangnya kesadaran bendahara dan pihak lain dalam mengikuti kebijakan di BPKBMD	Keterbatasan ruangan /

<p>Peningkatan kualitas Pelaporan keuangan</p>	<p>Laporan Keuangan Pemerintah</p>	<p>PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah</p> <p>Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi</p> <p>Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah</p>	<p>Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>Peraturan yang berubah-ubah</p> <p>Kurangnya pemahaman SKPD terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD</p>	<p>SKPD belum mampu menghasilkan laporan keuangan murni akrual secara langsung</p> <p>Kurangnya kepedulian SKPD terhadap rekonsiliasi laporan keuangan bulanan</p>
<p>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Pencatatan Barang Milik Daerah berdasarkan kontrak/transaksi</p>	<p>Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BMD</p>	<p>1. Pengurus barang yang menangani BMD belum memahami tupoksi tentang regulasi BMD;</p> <p>2. Honorarium penyimpan/pengurus barang yang rendah dibandingkan tugasnya;</p> <p>3. Kurangnya perhatian pengguna barang terhadap aset tetap yang dikuasai oleh SKPD</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi pengelolaan BMD</p> <p>2. Tidak adanya Bimtek tentang pengelolaan BMD kepada penyimpan dan pengurus barang</p> <p>3. Kesadaran dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah belum cukup</p>	<p>Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal</p>

Tabel  
Identifikasi Isu – Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
1	2	3	4
1	Penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas Asean	Menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebanyak 6 Koridor	Sulawesi Utara masuk dalam koridor 4 dan Minahasa Tenggara men-support dalam pengembangan kelapa
2	Harga minyak dunia menurun, sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global	Pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,6 % dan rendahnya serapan anggaran	Angka pengangguran yang masih tinggi diatas 2 digit
3	Situasi politik Timur Tengah yang tidak kondusif serta peranan ISIS	Paham radikal yang tinggi, teror dari teroris dan masalah Gafatar	Adanya perkelahian antar kampung
4	Perubahan Iklim / Global Warming	Kebakaran hutan dan pembalakan liar	Bencana alam yakni longsor, banjir, dll

#### Kondisi Yang Diharapkan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan perlu memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki dengan demikian kondisi yang diharapkan dapat terwujud. Adapun kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Identifikasi Kondisi yang Diharapkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Kondisi Yang di harapkan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<p>1. Terbatasnya PNS yang memahami peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah</p> <p>2. Adanya berbagai aplikasi pelaporan keuangan yang harus disampaikan ke pusat yang memiliki dampak pada penyaluran dana transfer</p> <p>3. Aplikasi SIMDA Gaji yang belum optimal</p>	<p>Peraturan tentang pengelolaan keuangan</p> <p>Aplikasi SIKD</p> <p>SIMDA Gaji</p>	<p>Ketersediaan peraturan tentang pengelolaan keuangan</p> <p>Terbatasnya PNS yang memahami aplikasi pelaporan keuangan</p> <p>Aplikasi untuk pengelolaan gaji yang belum optimal</p>	<p>Peraturan yang berubah-ubah</p> <p>Peraturan yang berubah-ubah</p> <p>Pembuat daftar gaji / Bendahara SKPD terlambat membuat daftar gaji / melakukan pencairan</p>	<p>PNS harus memahami, meningkatkan pengetahuan dan melaksanakan peraturan tersebut</p> <p>PNS harus meng-update aplikasi pelaporan keuangan</p> <p>Pencairan gaji sebelum tanggal 5 setiap bulannya</p>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan ruangan sehingga mengganggu konsentrasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kegiatan kantor	Belum adanya ruangan khusus untuk bendahara SKPD dan pihak lain yang berhubungan dengan BPKBMD	Kurangnya kesadaran bendahara dan pihak lain dalam mengikuti kebijakan di BPKBMD	Tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan SKPD dan pihak lain
Peningkatan kualitas Pelaporan keuangan	SKPD belum mampu menghasilkan laporan keuangan murni akrual secara langsung	<p>PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah</p>	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Peraturan yang berubah-ubah	Laporan Keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual

	Kurangnya kepedulian SKPD terhadap rekonsiliasi laporan keuangan bulanan	Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi  Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		Kurangnya pemahaman SKPD terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD	Laporan Keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BMD	1. Pengurus barang yang menangani BMD belum memahami tupoksi tentang regulasi BMD; 2. Honorarium penyimpan/pengurus barang yang rendah dibandingkan tugasnya; 3. Kurangnya perhatian pengguna barang terhadap aset tetap yang dikuasai oleh SKPD	1. Kurangnya sosialisasi pengelolaan BMD 2. Tidak adanya Bimtek tentang pengelolaan BMD kepada penyimpan dan pengurus barang 3. Kesadaran dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah belum cukup	Pengelolaan Barang milik daerah yang optimal

## Analisis SWOT

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1.	Tersusunnya database dalam rangka pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah telah tercatat dalam aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Gaji dan SIMDA Barang Milik Daerah	1.	Peraturan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah yang berubah – ubah
2.	Kemampuan SDM yang cukup dalam mengoperasikan SIMDA	2.	Minimnya aparatur yang mengikuti diklat pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.	Adanya kemauan pemerintah yang ingin menjadi daerah percontohan pelayanan publik terbaik	3.	Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan
PELUANG		ANCAMAN	
1.	Adanya komitmen pimpinan untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	1.	Peraturan pemerintah yang cepat berubah yang belum didukung dengan aturan pelaksanaannya
2.	Kondisi politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang kondusif	2.	Keterbatasan anggaran
3.	Sosial kemasyarakatan yang baik	3.	Kurangnya kesadaran para pengguna barang dalam menggunakan dan memelihara barang milik daerah
		4.	Lemahnya penegakan hukum terhadap kelalaian penggunaan BMD

## BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN – SASARAN STRATEGIS

### 4.1. Visi Dan Misi

Berdasarkan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara yang tertuang dalam RPJMD adalah “Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”.

Penjelasan atas Visi :

- ) Berdaulat adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.
- ) Berdikari adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.
- ) Berkepribadian adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/ jati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi diatas, telah dirumuskan 5 Misi yang juga disebut sebagai 5 sukses yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Demokratis, Profesional, melayani, rukun dan damai.  
Misi pertama ini disebut sebagai “Sukses Pemerintahan”
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin Berkualitas, serta memberdayakan masyarakat.  
Misi kedua ini disebut sebagai “Sukses Pemberdayaan Masyarakat”

3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa), dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.

Misi ketiga ini disebut sebagai "Sukses Perekonomian Daerah"

4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, Meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir.

Misi keempat ini disebut sebagai "Sukses Pembangunan"

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.

Misi kelima ini disebut "Sukses Lingkungan Hidup"

Mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara lebih terarah pada Misi "Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Demokratis, Profesional, melayani, rukun dan damai. (Sukses Pemerintahan). Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah "MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL, MANDIRI DENGAN DI TUNJANG OLEH SUMBER DAYA YANG PROFESIONAL".

Misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Barang milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif dan Transparan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan berintegritas.

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang ditetapkan sebagai hasil akhir dalam jangka waktu lima tahun melalui langkah – langkah yang berisikan program indikatif sesuai dengan target dan sasaran yang terukur. Kondisi yang ingin dicapai tersebut diimplementasikan dalam Tujuan sebagai berikut :

##### ❖ Tujuan Pertama

Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
- Meningkatnya sistem yang menunjang pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah

##### ❖ Tujuan kedua

Adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya kualitas laporan keuangan dengan opini WTP mulai tahun 2017

##### ❖ Tujuan ketiga

Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal dan berintegritas.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah :

- Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah

#### 4.3. Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah :

- Penyediaan dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
- Penyediaan sistem yang menunjang pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
- Penyediaan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis paket regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- Meningkatkan kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi pendataan program dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

### 5.1 Rencana Program

Rencana Program Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun adalah :

A. Program prioritas yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah.
3. Program Peningkatan Penatausahaan keuangan Daerah.
4. Program Pengelolaan Aset Daerah

B. Program Pendukung yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

### 5.2 Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

a. Sekretariat :

1. Program Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
2	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

3	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
4	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
5	Penataan Kearsipan
6	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3	Pengadaan Peralatan Gedung kantor
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur
3	Penyusunan Renstra, Renja, dan Indikator Kinerja SKPD

5. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

## b. Bidang Anggaran

## 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan
1	Penyusunan Analisa Standar Biaya
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
6	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pergeseran APBD
9	Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
10	Penyusunan Standar Biaya Umum
11	Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS
12	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai
13	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
14	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

## c. Bidang Barang Milik Daerah

## 1. Program Pengelolaan Aset Daerah

No	Kegiatan
1	Penyusunan Standar Satuan Harga
2	Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
3	Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah
4	Sertifikasi Aset
5	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah
6	Penghapusan Barang Inventaris
7	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah
8	Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah
9	Penyusunan DKBMD dan DKPBMD
10	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD
11	Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
12	Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah
13	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
14	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penetapan kode komponen pemilik barang, nomor, kode, unit, kode lokasi, dan kode barang daerah
15	Penyusunan Peraturan Bupati tentang umur ekonomis barang
16	Penyusunan Peraturan Bupati pedoman penatausahaan persediaan di lingkungan

	pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
17	Penyusunan Peraturan Bupati tentang sewa tanah dan bangunan milik pemerintah
18	Penyusunan Peraturan Bupati tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
19	Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang milik daerah
20	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penggunaan barang milik daerah
21	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penatausahaan barang milik daerah
22	Penyusunan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan sensus barang milik daerah
23	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penilaian barang milik daerah
24	Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
25	Penyusunan Peraturan Bupati tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
26	Penyusunan Peraturan Bupati tentang kebijakan kapitalisasi barang milik daerah
27	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penerimaan barang milik daerah yang berasal dari hibah
28	Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milik daerah
29	Bimbingan teknis pengelolaan barang dan jasa
30	Pelaksanaan sensus barang milik daerah
31	Penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan LKPD
32	Pelelangan barang milik daerah

d. Bidang Perbendaharaan

1. Program Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Pengelolaan Kas Daerah

3	Penelitian kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran
4	Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya
5	Pengelolaan Kas Non Anggaran
6	Pembinaan Perbendaharaan

e. Bidang Akuntansi

1. Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah

No	Kegiatan
1	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3	Penyelesaian Piutang Daerah
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Penyusunan LKPD
6	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan dan triwulan SKPD
7	Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial
8	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Utang PFK
9	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrua
10	Penyusunan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah
11	Penyusunan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi akrua
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan utang pihak ketiga
13	Penyusunan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah
14	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Adapun yang menjadi indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

➤ Tujuan Pertama :

Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Indikator tercapainya tujuan ini adalah terlaksananya program pembangunan dengan baik dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk mendukung visi dan misi kepala daerah

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

1. Meningkatnya Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, yang ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:
  - a. Tersedianya analisa standar belanja, standar biaya umum dan dokumen pengelolaan keuangan
  - b. Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD dan Penjabaran APBD
  - c. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
  - d. Terlaksananya pengelolaan gaji pegawai
  - e. Tersedianya standar satuan harga dan dokumen pengelolaan barang milik daerah
  - f. Dilaksanakannya rekonsiliasi barang milik daerah
  - g. Adanya sertifikasi / pengamanan aset

- h. Terlaksananya Pengelolaan kas daerah, kas non anggaran dan pengelolaan dana transfer

➤ Tujuan kedua:

Meningkatkan kualitas laporan keuangan

Indikator tercapainya tujuan ini adalah Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan oleh indikator yaitu:
  - a. Tersedianya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - b. terselesaikannya piutang daerah
  - c. Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun dan laporan keuangan pemerintah daerah

➤ Tujuan Ketiga:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan berintegritas

Indikator tercapainya tujuan ini adalah tersedianya aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah yang berkompeten

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah di BPKBMD dan di tiap-tiap SKPD, yang ditunjukkan oleh indikator:

- a. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- b. Dilaksanakannya bimbingan teknis tentang penyusunan APBD
- c. Dilaksanakannya bimbingan teknis tentang pengelolaan gaji
- d. Dilaksanakannya pembinaan perbendaharaan
- e. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan akuntansi berbasis akrual



BAB VII  
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 - 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKBMD untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, Ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen antara pimpinan dan staf BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2014 - 2018, setiap tahun akan diadakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BPKBMD 2014–2018 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPKBMD 2014–2018 yang mengacu pada RPJMD 2013–2018.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
BARANG MILIK DAERAH

MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE.M.Si  
Pembina Tkt I  
NIP. 196603281994031005

**RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
BADAN PENELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	5 2 2 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum															
				Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan	Honor non pns 1 thun, ATK, alat listrik, Peralatan kebersihan, Telepon, listrik, surat kabar,	494,549,929.00	Honor non pns1 thun, ATK, alat listrik, peralatan kebersihan, telepon, listrik, surat kabar,	1,100,000,000	Honor non pns 1 thun, ATK, alat listrik, Peralatan kebersihan, Telepon, listrik, suarta	1,700,000,000	Honor non pns 1 thun, ATK, alat listrik, Peralatan kebersihan, Telepon, listrik, suarta	1,870,000,000	Honor non pns 1 thun, ATK, alat listrik, Peralatan kebersihan, Telepon, listrik, suarta	5,164,549,929	BPKBMD				
				Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Honor pengelola keuangan, lembur, ATK, dill, cetak,	239,091,600.00	Honor pengelola keuangan, lembur, ATK, materai, dill, cetak,	309,500,000	Honor pengelola keuangan, lembur, ATK, materai, dill, cetak,	340,450,000	Honor pengelola keuangan, lembur, ATK, materai, dill, cetak, penggandaan	374,495,000	Honor pengelola keuangan, lembur, ATK, materai, dill, cetak, penggandaan	1,263,536,600					
				Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pelayanan	Honor satuan pengelola barang dan jasa, ATK, penggandaan, mami	58,400,000.00	Honor satuan pengelola barang dan jasa, ATK, penggandaan, mami	145,900,000	Honor satuan pengelola barang dan jasa, ATK, penggandaan, mami	160,490,000	Honor satuan pengelola barang dan jasa, ATK, penggandaan, mami rapat	176,539,000	Honor satuan pengelola barang dan jasa, ATK, penggandaan, mami rapat	541,329,000					
				Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Cetak, penggandaan, ATK, mami rapat	60,000,000.00	Cetak, penggandaan, ATK, mami rapat	80,000,000	Cetak, penggandaan, ATK, mami rapat	88,000,000	Cetak, penggandaan, ATK, mami rapat	96,800,000	Cetak, penggandaan, ATK, mami rapat	324,800,000					
				Penataan Kearsipan	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Cetak pengandaan, ATK, jasa arsiparis,	69,300,000.00	Honor, pegawai tidak tetap, ATK, bahan kimia, cetak	83,200,000.00	Honor, pegawai tidak tetap, ATK, bahan kimia, cetak	97,500,000	Honor pegawai tidak tetap, ATK, bahan kimia, cetak	107,250,000	Honor pegawai tidak tetap, ATK, bahan kimia, cetak	475,225,000					
5 2 2 1 5	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 2 2 1 6	ATK, cetak, penggandaan, perjalanan dinas luar daerah	180,600,000.00	ATK, cetak, penggandaan, perjalanan dinas luar daerah	385,000,000	ATK, cetak, penggandaan, perjalanan dinas luar daerah	400,000,000	ATK, cetak, penggandaan, perjalanan dinas luar daerah	440,000,000	ATK, cetak, penggandaan, perjalanan dinas luar daerah	1,405,600,000							
				Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya hubungan kerjasama dan koordinasi	Memperlancar pekerjaan														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
				Pengadaan mebeleur	1. Pembelian peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan kantor 2. Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan		Almari 6 unit, meja kerja 2 unit, meja rapat 16 unit, kursi kerja 26 unit, kursi	154,150,000	kursi kerja pejabat 1 unit, kursi hadap depan meja	40,000,000.00								Almari 6 unit, meja kerja 2 unit, meja rapat 16 unit,	194,150,000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor  Adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor			-	penggantian, ganti grandel, dan kunci-kunci pintu	50,000,000.00	penggantian, ganti langit-langit	25,000,000	penggantian, ganti grandel, dan kunci-kunci pintu	35,000,000	penggantian, ganti grandel, dan kunci-kunci pintu	50,000,000	penggantian, ganti grandel, dan kunci-kunci pintu	160,000,000		
				Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Memperlancar pelaksanaan pekerjaan		1 unit	250,000,000.00	5 unit	1,460,000,000.00	2 unit	235,000,000	-	-	-	-	-	8 unit	1,945,000,000	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		Mesin foto copy 2 unit, komputer untuk server 1 unit, software utk server, laptop, kimpoter, printerups	687,340,000.00	laptop 3 unit	172,500,000.00	server 1unit + jaringan, laptop 3 unit, PC 4 unit, Printer 10 unit, printer bercode 2 unit,	438,600,000	Scanner 3 unit, hardisk 10 bh, laptop 5 unit	482,460,000				Mesin foto copy 2 unit, komputer untuk server 1 unit, software utk server,	1,780,900,000	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Perlengkapan gedung kantor Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatkan kinerja pegawai Pelayanan prima		Brankas 2 unit, AC standing, Kulkas, tea maker, coffe maker, kamera 2 unit, handycam, soundsyste	383,634,600.00	Brankas 2 unit, AC split, UPS 10 unit, HT 1 unit,	148,000,000.00	Lemari besi 2 unit, lemari buku dengan kaca 2 bh, rak besi utk server, senset 1 unit, AC	621,000,000	Rak besi untuk arsip, lemari besi unit, filling kabinet, brankas 1 unit, meja	350,000,000	Scanner 3 unit, hardisk 10 unit, laptop 5 unit	385,000,000	Brankas 2 unit, AC standing, Kulkas, tea maker, coffe maker, kamera 2 unit, handycam	1,887,634,600		
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Memperlancar pekerjaan Meningkatkan kinerja dan pelayanan publik		Motor 7 unit, mobil 6 unit	335,674,402.00	Motor 7 unit, mobil 9 unit	349,960,000.00	Motor 7 unit, mobil 11 unit	1,500,000,000	Motor 7 unit, mobil 11 unit	1,650,000,000	Motor 7 unit, mobil 11 unit	1,815,000,000	Motor 7 unit, mobil 11 unit	5,650,634,402		
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Memperlancar pekerjaan		100%	-	Service genset, servive pompa air,	50,000,000.00	Service genset, servive pompa air, service AC	50,000,000	Service genset, servive pompa air, service AC	55,000,000	Service genset, servive pompa air, service AC	60,500,000	Service genset, servive pompa air, service AC	215,500,000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buku Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Buku Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Pelaksanaan APBD dapat dievaluasi		1 dok	81,733,900.00	1 dok	135,418,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100%	217,151,900	
				Penyelesaian Piutang Daerah	Prosentase piutang daerah yang tertagih  Penerimaan piutang daerah		80%	51,080,500.00	80%	74,160,000.00	83%	81,576,000	85%	89,733,600	85%	98,706,960	85%	395,257,060		
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dan Laporan Prognosis Semesteran Seluruh SKPD  Laporan Prognosis Realisasi Anggaran  Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dan Semesteran yang selesai tepat waktu  Laporan Keuangan Pemda selesai tepat waktu		2 dok	75,597,500.00	2 dok	34,769,000.00	2 dok	47,225,000	2 dok	50,000,000	2 dok	55,000,000	10 Dokum	262,591,500		
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Penyusunan LKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan LKPD  Laporan Keuangan Akhir Tahun  Laporan Akhir Tahun yang tepat waktu mendorong LKPD dan LKPJ selesai tepat waktu		2 laporan	159,325,700.00	2 laporan	322,706,400.00	2 laporan	354,977,040	2 laporan	500,000,000	2 laporan	550,000,000	2 laporan	1,887,009,140		
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  LKPJ dapat selesai tepat waktu dan APBDP cepat terlaksana.  Rangkaian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu			-		-	1 dok	200,000,000	1 dok	220,000,000	1 dok	242,000,000	3 dok	662,000,000		
				Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial	Prosentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran  Tersedianya laporan penyaluran belanja bantuan sosial  Penyaluran belanja bantuan sosial dapat di monitoring dan dievaluasi		100%	32,285,500.00	100%	40,000,000.00	100%	55,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	277,285,500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran															
				Rekonsiliasi Laporan Keuangan Utang PFK	Laporan keuangan utang PFK yang telah direkonsiliasi Terlaksananya laporan keuangan utang PFK Kesalahan laporan keuangan PFK dapat dideteksi Memudahkan penyajian LKPD			-	1 Lap	73,610,000.00	1 Lap	80,971,000	1 Lap	89,068,100	1 Lap	97,974,910	4 Lap	341,624,010		
Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas	Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan	Aparat pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang memahami		Bimbingan Teknis dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrua	Aparat yang memahami sistem akuntansi berbasis akrua SKPD dapat mengetahui sistem akuntansi berbasis akrua SKPD dapat memahami sistem akuntansi berbasis akrua Tersajinya laporan keuangan berbasis akrua			-	129	350,000,000	129	400,000,000	129	440,000,000	129	484,000,000	516	1,674,000,000		
Adanya peningkatan kualitas	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dengan	Opini pemeriksaan BPK		Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Akrua	Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Akrua Tersedianya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Akrua		-	-	-	-	1 dok	50,000,000	-	-	-	-	1 dok	50,000,000		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Utang Pihak Ketiga	Tersusunnya Laporan Keuangan Utang Pihak Ketiga Tersedianya Laporan Keuangan Utang Pihak Ketiga						1 lap	75,000,000	1 lap	82,500,000	1 lap	100,000,000	3 lap	257,500,000		
				Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1 dok	200,000,000	1 dok	250,000,000	1 dok	275,000,000	3 dok	725,000,000		
				Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 dok	63,071,000.00	1 dok	83,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	146,971,000		
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Peraturan bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah		1 Dok	111,960,000.00	1 Dok	135,000,000.00	1 Dok	137,500,000	1 Dok	140,000,000	1 Dok	143,000,000	5 Dok	667,460,000		
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyerahan Modal	Peraturan Daerah tentang penyerahan modal Meningkatnya sistem pelaporan keuangan daerah		1 Dok	13,250,000.00	-	-	1 Dok	150,000,000.00	1 Dok	100,000,000.00	1 Dok	100,000,000.00	1 Dok	363,250,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Rekonsiliasi dan Pembinaan Perbendaharaan	Laporan rekonsiliasi		12 Lap	56,483,700.00	12 Lap	177,811,000.00	12 Lap	195,592,100.00	12 Lap	215,151,310.00	12 Lap	236,666,441.00	12 Lap	881,704,551	
				Penyusunan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah						1 Dok	75,000,000	1 Dok	82,500,000	1 Dok	90,750,000	3 Dok	248,250,000	
				Peningkatan sistem informasi keuangan daerah	Tersedianya SIMDA						100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	1,050,000,000	
				Penyusunan laporan keuangan audited	Laporan keuangan audited						1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	130,000,000	
Menciptakan tertib administrasi	Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan		<b>Program Pengelolaan Aset</b>	Meningkatnya pengelolaan aset daerah														
				Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan Terlaksananya penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya acuan standar satuan harga Terwujudnya Pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah yang baik		1 Buku	71,255,000.00	1 Buku	78,380,500.00	1 Buku	86,218,550	1 Buku	94,840,405	1 Buku	104,324,446	6 buku	435,018,901	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Prosentase barang milik daerah yang diinventarisasi Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik		100%	45,882,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	45,882,300	
				Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Prosentase barang yang di revaluasi/appraisal Tersedianya nilai barang milik daerah Terwujudnya pengamanan aset daerah Terwujudnya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah yang baik		30%	419,790,100.00	30%	150,000,000.00	20%	200,000,000	10%	220,000,000	10%	242,000,000	100%	1,231,790,100	
				Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah Tersedianya data hasil rekon vane benar Keccocokan data akuntansi dan Aset Terwujudnya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah		4 Lap	75,350,400.00	4 Lap	82,885,440.00	4 Lap	91,173,984	4 Lap	100,291,382	4 Lap	110,320,521	4 Lap	460,021,727	
				Sertifikasi Aset	Prosentase aset yang memounval sertifikat Sertifikasi aset pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara		30%	128,352,036.00	30%	134,455,900.00	40%	147,901,490	50%	162,691,639	60%	178,960,803	100%	752,361,868	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Tersedianya Data Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah														
				Pengamanan Aset Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	Presentase Pengamanan aset daerah Terlaksananya pengamanan aset daerah Pengamanan aset daerah lebih optimal Terwujudnya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah		100%	198,233,100.00	100%	170,779,000.00	100%	45,000,000	100%	75,000,000	100%	82,500,000	100%	571,512,100	
				Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah	Jumlah penerima hibah Terwujudnya penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah		10	20,481,500.00	77	45,000,000.00	92	53,400,000	102	50,000,000	120	50,000,000	401	218,881,500	
				Sensus Barang Milik Daerah	Laporan sensus barang milik daerah Laporan sensus barang milik daerah Tersedianya informasi mengenai barang milik daerah Tersedianya informasi mengenai barang milik daerah			-		-	1 Lap	150,000,000	1 Lap	165,000,000	1 Lap	181,500,000	3 Lap	496,500,000	
				Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Presentase pengelolaan sistem informasi barang milik daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-	100%	75,600,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	75,600,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Komponen Pemilik Barang, Nomor, Kode, unit, Kode Lokasi dan Kode	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Komponen Pemilik Barang Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Komponen Pemilik Barang			-		-	1 dok	35,000,000	1 dok	50,000,000	1 dok	55,000,000	3 dok	140,000,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Umur Ekonomis Barang	Jumlah Peraturan Bupati tentang Umur Ekonomis Barang Tersedianya Peraturan Bupati tentang umur Ekonomis Barang			-		-	1 dok	35,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	60,500,000	3 dok	150,500,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tersedianya Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan			-	1 dok	50,000,000.00		-	0%	-	0%	-	1 dok	50,000,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang sewa tanah dan bangunan milik pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah Peraturan Bupati tentang sewa tanah dan bangunan milik pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara			-	1 dok	20,584,700.00	0%	-	0%	-	0%	-	1 dok	20,584,700	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Sewa Tanah dan Bangunan														
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-		-	1 dok	35,000,000	0%	-	0%	-	1 dok	35,000,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-		-	1 dok	35,000,000	0%	-	0%	-	1 dok	35,000,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-		-	1 dok	35,000,000	0%	-	0%	-	1 dok	35,000,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-	1 dok	20,053,000.00	-	-	-	-	-	-	1 dok	20,053,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-		-	1 dok	35,000,000	-	-	-	-	1 dok	35,000,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-	1 dok	21,502,000.00	-	-	-	-	-	-	1 dok	21,502,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-	1 dok	22,155,000.00	-	-	-	-	-	-	1 dok	22,155,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-		-	1 dok	35,000,000	-	-	-	-	1 dok	35,000,000	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-	1 dok	23,637,700.00	-	-	-	-	-	-	1 dok	23,637,700	
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Barang Milik Daerah yang berasal dari Hibah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penerimaan Barang Milik Daerah yang berasal dari Hibah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			-		-	1 dok	35,000,000	-	-	-	-	1 dok	35,000,000	
Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas	Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan	Aparat pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang memahami		Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aparat yang memahami kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah			-		-	129 Org	50,000,000	-	-	-	-	129 Org	50,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Adanya peningkatan kualitas dan	Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola	Aparat pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah			Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah																
				Bimtek Pengelolaan Barang dan Jasa	Aparat yang memahami aturan tentang pengelolaan barang dan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						86 Org	150,000,000	86 Org	100,000,000	86 Org	100,000,000	86 Org	350,000,000			
Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah		Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah	Presentase barang yang disensus Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						100%	150,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	260,000,000			
				Penilaian Barang Milik Daerah dalam Rangka Penyusunan LKPD	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah dalam Rangka Penyusunan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	150,000,000			
				Pelelangan Barang Milik Daerah	Kegiatan pelelangan barang milik daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah							1 kegiatan	150,000,000	1 kegiatan	165,000,000	1 kegiatan	181,500,000	1 kegiatan	496,500,000		
				Penyusunan peraturan Bupati tentang tentang standarisasi sarana dan prasarana pemerintah kabupaten minahasa tenggara	Jumlah peraturan Bupati tentang tentang standarisasi sarana dan prasarana pemerintah kabupaten minahasa tenggara Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah							1 Dok	27,500,000	1 Dok	30,250,000	1 Dok	33,275,000	3 Dok	91,025,000		
				Penyusunan peraturan bupati tentang penyusutan barang milik daerah	Jumlah peraturan bupati tentang penyusutan barang milik daerah							1 Dok	27,500,000	1 Dok	30,250,000	1 Dok	33,275,000	3 Dok	91,025,000		
				Penyusunan revisi peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah	Jumlah peraturan bupati tentang revisi peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah							1 Dok	27,500,000	1 Dok	30,250,000	1 Dok	33,275,000	3 Dok	91,025,000		
				Penyusunan peraturan bupati tentang penetapan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah peraturan bupati tentang penetapan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah							1 Dok	27,500,000	1 Dok	30,250,000	1 Dok	33,275,000	3 Dok	91,025,000		
				Penyusunan laporan persediaan barang milik daerah	Jumlah laporan persediaan barang milik daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah							1 laporan	30,000,000	1 laporan	33,000,000	1 laporan	36,300,000	3 Laporan	99,300,000		
				Penilaian tanah bawah jalan	Jumlah ruas jalan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah									106 ruas jalan	80,000,000	20 ruas jalan	88,000,000	20 ruas jalan	80,000,000	146 ruas jalan	248,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Penyusunan RKBMMD Pengadaan	Jumlah laporan RKBMMD pengadaan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	24,200,000	3 laporan	66,200,000		
				Penyusunan RKBMMD Pemeliharaan	Jumlah laporan RKBMMD Pemeliharaan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	24,200,000	3 laporan	66,200,000		
				Penyusunan RKBMMD Pemanfaatan	Jumlah laporan RKBMMD Pemanfaatan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	24,200,000	3 laporan	66,200,000		
				Penyusunan RKBMMD Pemindahtanganan	Jumlah laporan RKBMMD Pemindahtanganan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	24,200,000	3 laporan	66,200,000		
				Penyusunan RKBMMD Penghapusan	Jumlah laporan RKBMMD Penghapusan Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	24,200,000	3 laporan	66,200,000		
				Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah						1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	99,000,000	1 Laporan	108,900,000	3 laporan	297,900,000		
				Penyusunan revisi peraturan daerah tentang barang milik daerah	Jumlah peraturan daerah tentang barang milik daerah						1 Dok	120,000,000	1 Dok	132,000,000	1 Dok	145,200,000	3 Dok	397,200,000		
Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan	Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah		<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	untuk penyusunan penganggaran yang lebih baik															
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pelaksanaan Anggaran Tepat Waktu Terlaksananya Program dan kegiatan SKPD secara berkualitas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pembangunan di Kab. Minahasa Tenggara berjalan baik, sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku.		1 dok	168,389,300.00	1 dok	165,021,236.00	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	333,410,536	
				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Pelaksanaan Anggaran Tepat Waktu		1 buku	80,465,500.00	1 buku	62,901,107.00	-	-	-	-	-	-	-	1 buku	143,366,607	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Terlaksananya Program dan kegiatan SKPD secara berkualitas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pembangunan di Kab. Minahasa Tenggara berjalan baik, sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku.														
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Nota Keseluruhan Tersedianya buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Terlaksananya Program dan kegiatan SKPD secara berkualitas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Program pembangunan berjalan baik dan setiap perubahan program/kegiatan memiliki dasar hukum yang jelas		1 dok	158,883,050.00	1 dok	210,635,080.00	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	369,518,130
				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersedianya Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mengkomodir semua perubahan anggaran SKPD yang sesuai dengan aturan yang berlaku Pembangunan di Kab. Minahasa Tenggara berjalan baik, sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku.		1 dok	106,640,000.00	1 dok	64,641,159.00	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	171,281,159
				Penyusunan Standar Biaya Umum	Buku Standar Biaya Sistem pengendalian anggaran yang baik		1 Buku	75,000,000.00	1 dok	85,000,000.00	1 dok	93,500,000	1 dok	102,850,000	1 dok	113,135,000	5 dok	469,485,000	
				Pengendalian dan Penyerapan Anggaran Daerah	Persentase pengendalian dan penyerapan anggaran  Sistem pengendalian dan penyerapan anggaran yang baik		80%	200,000,000.00	80%	250,000,000.00	80%	320,000,000	80%	315,000,000	80%	345,000,000	100%	1,430,000,000	
				Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas dan penerbitan DPA	Pelaksanaan Anggaran Tepat waktu		90%	48,773,000.00	90%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	48,773,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal berintegritas	Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah	Aparat pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang memahami aturan		Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Aparat yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah  Meningkatkan pemahaman tentang cara pengelolaan keuangan daerah vane sesuai aturan Pembangunan di Kab. Minahasa Tenggara berjalan baik, sesuai prosedur dan		50 Org	42,037,600.00	50 Org	36,764,281.00	50 Org	100,000,000	50 Org	110,000,000	50 Org	120,000,000	250 Org	408,801,881			
				Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah  Aparat yang memahami aturan dalam mengelola keuangan daerah  Pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku.		100 Org	374,232,600.00	100 Org	216,757,306.00	100 Org	307,610,000	100 Org	325,000,000	100 Org	335,000,000	500 Org	1,558,599,906			
Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah		Penyusunan Pergeseran Anggaran	Buku Peraturan Bupati tentang Pergeseran APBD  Tersedianya Buku Perbup tentang pergeseran APBD  Perbup Pergeseran APBD untuk mengakomodir akan adanya pergeseran anggaran tiap SKPD yang akan ditampung dalam Perda Perubahan APBD  Pergeseran Anggaran tiap SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pengelolaan keuangan berjalan baik		1 dok	89,318,050.00	1 dok	37,660,154.00	1 dok	40,000,000	1 dok	35,000,000	1 dok	35,000,000	5 dok	236,978,204			
				Penyusunan Laporan Semester Gaji PNS	Laporan semester Gaji PNS  Tersedianya Laporan semester Gaji PNS  Penyajian laporan data gaji PNS yang tepat waktu  Pengelolaan Keuangan berjalan dengan baik				2 Laporan	12,596,728.00									100%	12,596,728	
				Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai	Laporan Rekonsiliasi Gaji Pegawai  Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Gaji Pegawai				4 Laporan	48,193,020.00	4 Laporan	55,000,000	4 Laporan	63,000,000	4 Laporan	69,300,000	16 Laporan	235,493,020			
				Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen Keuangan daerah  Meningkatnya sistem informasi manajemen keuangan daerah					100%	162,520,064.00										162,520,064

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik															
				Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	Peraturan Daerah tentang APBD  Pelaksanaan Anggaran Tepat Waktu  Terlaksananya Program dan kegiatan SKPD secara berkualitas, tepat waktu dan dapat Pembangunan di Kab. Minahasa Tenggara berjalan baik, sesuai prosedur dan		1 dok	150,000,000.00	1 dok	250,000,000.00	1 dok	300,000,000	1 dok	350,000,000	1 dok	385,000,000	5 dok	1,435,000,000		
				Penyusunan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD  Pelaksanaan Anggaran Tepat Waktu		1 dok	100,000,000.00	1 dok	125,000,000.00	1 dok	175,000,000	1 dok	192,500,000	1 dok	211,750,000	5 dok	804,250,000		
					Terlaksananya Program dan kegiatan SKPD secara berkualitas, tepat waktu dan dapat Pembangunan di Kab. Minahasa Tenggara berjalan baik, sesuai prosedur dan															
				Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan  Tersedianya buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  Terlaksananya Program dan kegiatan SKPD secara berkualitas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Program pembangunan berjalan baik dan setiap perubahan program/kegiatan memiliki dasar hukum		1 dok	145,000,000.00	1 dok	175,000,000.00	1 dok	210,000,000	1 dok	231,000,000	1 dok	254,100,000	5 dok	1,015,100,000		
				Penyusunan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD  Tersedianya Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD  Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan mengomodir semua perubahan anggaran SKPD yang sesuai dengan aturan Pembangunan di Kab. Minahasa Tenggara berjalan baik, sesuai prosedur dan perundangan yang		1 dok	120,000,000.00	1 dok	135,000,000.00	1 dok	150,000,000	1 dok	165,000,000	1 dok	170,000,000	5 dok	740,000,000		
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa			-		47,435,000.00	-	-	-	-	-	-	100%	47,435,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal berintegritas	Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah	Aparat pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang memahami aturan			Pengelolaan Keuangan desa yang baik														
				Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis pedoman penyusunan APBD jumlah kegiatan bimbingan teknis			-	120 Org	225,022,036.00	120 Org	200,000,000	120 Org	220,000,000	120 Org	225,000,000	120 Org	870,022,036	
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji	Jumlah aparat yang memahami aturan pengelolaan gaji			-	43 Org	145,000,000.00	43 Org	150,000,000	43 Org	150,000,000	43 Org	150,000,000	43 Org	595,000,000	
Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah		<b>Program Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah														
				Pengelolaan Kas Daerah	Prosentase realisasi belanja			-	85%	47,500,000.00	80%	75,000,000	80%	82,500,000	80%	90,750,000	100%	295,750,000	
				Pengelolaan Kas Non Anggaran	Prosentase realisasi kas non aneangan Meningkatkan penatausahaan keuangan		95%	90,064,000.00	100%	200,462,000.00	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000	100%	1,018,726,000	
				Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya	Terlaksananya rekonsiliasi data transfer pusat antara Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI 2. Prosentase realisasi atas target		100%	78,232,700.00	100%	200,000,000.00	100%	300,000,000	100%	130,000,000	100%	135,000,000	100%	843,232,700	
				Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran	Agar terdapat kecocokkan saat Penerbitan SP2D dan saat membuat laporan Buku Kas Umum Daerah (BKU) serta saat melakukan Rekonsiliasi dengan Bank 2. Prosentase SP2D atas SPM terkoreksi		100%	189,462,900.00	100%	155,100,000.00	100%	115,000,000	100%	125,000,000	100%	127,500,000	100%	712,062,900	
				Peningkatan Sistem Informasi Gaji Pegawai	1. Agar supaya dalam Pembayaran Gaji Pegawai tidak terjadi kesalahan 2. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Gaji Pegawai		100%	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20,000,000	
				Rekonsiliasi dan Pelaporan IWP, PPh 21, dan TAPERUM Gaji PNS	1. Tercapainya kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan IWP, PPh 21, dan TAPERUM Gaji PNS 2. Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan IWP, PPh 21, dan TAPERUM Gaji PNS		100%	33,467,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33,467,000	
				Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah			-	100%	56,959,000.00	100%	50,000,000	-	-	100%	50,000,000	100%	156,959,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah														
				Pembinaan Perbendaharaan	Kegiatan			-	100%	75,700,000.00	100%	99,957,850	0%	125,000,000	0%	150,000,000	100%	450,657,850	
					Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah														
Jumlah								5.935.457.138		9.604.091.956		13.235.505.012		14.160.900.735		14.519.550.631		57.455.505.471	

Ratahan,  
KEPALA BADAN

MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196603281994031005

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

